

**LAPORAN KEGIATAN PROGRAM HIBAH
PENELITIAN SENIOR
TAHUN 2017**



**SENGKETA KEWENANGAN ANTARTINGKAT
PEMERINTAHAN TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN
KAPAL DI PELABUHAN PETI KEMAS PELINDO II
CABANG PANJANG**

Oleh:

**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum
Nurmayani, S.H., M.H.
Marlia Eka Putri, S.H., M.H**

**Dibiayai Oleh Dana DIPA BLU Fakultas Hukum
Universitas Lampung Tahun Anggaran 2017
Dengan Surat Penugasan Penelitian
Nomor: 1564 /UN26.12/DT/2017, Tanggal 9 Juni 2017**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	10-10-2017
NO. INVEN	115 /UN26 /8 /LPPM /2017
JENIS	Penelitian
PARAF	Ah

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN HIBAH PENELITIAN SENIOR TAHUN 2017**

Judul : Sengketa Kewenangan Antartingkat Pemerintahan Terhadap
Retribusi Pelayanan Kapal Di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II
Cabang Panjang

Kode/Rumpun Ilmu : 580/Sosial-Humaniora

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.

b. NIDN /NIP : 0014056202

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Administrasi Negara)

e. Nomor HP : 08154012314

f. Alamat surel : -

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Nurmayani, S.H., M.H.

b. NIDN/NIP : 0019126103

c. Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Administrasi Negara)

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Marlia Eka Putri, S.H., M.H

b. NIDN/NIP : 0021038401

c. Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Administrasi Negara)

Jumlah Mahasiswa
Terlibat : 4 mahasiswa: 1. Dimas Rilo Adrianto,S.H
2.Nanda Rizky Putra (1212011225) 3. Raden Arif (1212011258)
4. Ricco Andreas (1312011277)

Lokasi Penelitian : Provinsi Lampung

Lama Penelitian : 6 bulan (24 minggu)

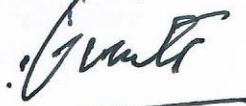
Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000

Sumber Dana : DIPA BLU FH Unila 2017

Target keluaran : Draf Jurnal Nasional Terakreditasi

Bandar Lampung, Oktober 2017

Ketua Peneliti,



Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196205141987031003



Mengetahui,
Dekan,
Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP. 196206221987031005

Menyetujui,

Ketua LPPM Unila



Ir. Warsono, M.S., Ph.D.
NIP.196302161987031003 #

SENKETA KEWENANGAN ANTARTINGKAT PEMERINTAHAN TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PETI KEMAS PELINDO II CABANG PANJANG

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah masing-masing. Penelitian ini hendak membahas sengketa kewenangan tingkat pemerintah terhadap retribusi pelayanan kapal di pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Lampung. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibedah dengan menggunakan metodologi penelitian hukum yang bercorak normologis, sehingga hukum dipahami sebagai seperangkat norma peraturan tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perizinan investasi sebagai bahan hukum. Hasil penelitian akan diupayakan untuk mengkonstruksi pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap kewenangan pada tiap-tiap tingkatan pemerintah, dengan demikian setiap tingkatan pemerintah tidak terjadi sengketa kewenangan. Kewenangan yang jelas pada setiap tingkatan pemerintah berarti memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan kapal, dan sekaligus memberikan pelayanan. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan otonomi dalam pelaksanaan pembangunan daerah semakin besar, hal ini disertai dengan kewenangan untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan daerah yang luas, dan diharapkan dapat memenuhi berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas masalah utama yang banyak dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia adalah masalah keuangan. Pemerintah daerah harus mampu melaksanakan pembiayaan bagi daerahnya secara mandiri. Kaitan yang sangat erat dengan masalah ini adalah darimana dan bagaimana pemerintah daerah harus mampu menyediakan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut. Kewenangan pemerintah daerah tersebut secara riil dihadapkan pada kendala yaitu belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Padahal daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini penting sebagai sebuah kajian, karena salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuandi bidang keuangan.

Kata Kunci: Sengketa Kewenangan, Tingkatan Pemerintah, Retribusi Pelayanan Kapal

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Kewenangan.....	5
2.2. Macam-macam Kewenangan	7
2.3. Urusan Pemerintah Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah	11
2.4. Pengertian Retribusi	12
2.4. Macam-Macam Kepelabuhan	16
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	18
3.2. Metode Pengumpulan Data	18
3.3. Analisis Data	18
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Bidang Usaha Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang	20
4.1.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Kapal di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang	21
4.2. Cara Penyelesaian Sengketa Antar Tingkat Pemerintah Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Kapal Di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Pnjang.....	33
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	36
5.2. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	